

**ANALISIS PERAN *STAKEHOLDER* DALAM PENGEMBANGAN
WISATA TALANG AIR PENINGGALAN KOLONIAL BELANDA
DI KELURAHAN PAJARESUK KABUPATEN PRINGSEWU**

(Skripsi)

Oleh

NI'MAH AULIA HIDAYAH



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRACT**ANALYSIS OF THE STAKEHOLDER ROLE IN THE DEVELOPMENT
OF TALANG AIR TOURS DUTCH COLONIAL HERITAGE IN
PAJARESUK VILLAGE, PRINGSEWU REGENCY****By****NI'MAH AULIA HIDAYAH**

Stakeholders are individuals or groups that are actively involved in activities or who are affected by both positive and negative from the results of the activities. The role of stakeholders is needed to carry out development including tourism development, stakeholders who can engage in tourism development are community, government and private sector, by involving the three actors, the development of tourism can be done optimally. Each stakeholder involved has different influences and interests in accordance with their sphere and responsibilities, so that their involvement will provide different benefits in the implementation of tourism development. The results of this study illustrate that the stakeholders involved in Talang Air tourism development consist of community, government, and private sector, and stakeholder involved in Talang Air tourism development has done various development both physical and non-physical development. Cooperation and communication that exists between stakeholders is relatively good so that accelerate the process of implementation of Talang Air tourism development.

Keywords: Stakeholder, Tourism, Talang Air Tours

ABSTRAK

ANALISIS PERAN *STAKEHOLDER* DALAM PENGEMBANGAN WISATA TALANG AIR PENINGGALAN KOLONIAL BELANDA DI KELURAHAN PAJARESUK KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

NI'MAH AULIA HIDAYAH

Stakeholder adalah individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam kegiatan atau yang terkena dampak baik positif maupun negatif dari hasil pelaksanaan kegiatan. Peran *stakeholder* dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan pada bidang pariwisata, *stakeholder* yang dapat terlibat dalam pengembangan pariwisata adalah masyarakat, pemerintah, dan sektor *privat*, dengan melibatkan ke tiga aktor tersebut maka perkembangan pariwisata dapat terlaksana secara optimal. Setiap *stakeholder* yang terlibat memiliki pengaruh dan kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan ranah dan tanggungjawabnya, sehingga keberadaan mereka akan memberikan manfaat yang berbeda-beda pula dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata. Hasil penelitian menggambarkan bahwa *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan Wisata Talang Air terdiri dari masyarakat, pemerintah, dan sektor *privat*, kemudian *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan Wisata Talang Air telah melakukan berbagai pembangunan baik pembangunan yang bersifat fisik maupun pembangunan yang bersifat nonfisik. Kerjasama dan komunikasi yang terjalin antar*stakeholder* relatif baik sehingga mempercepat proses pelaksanaan pengembangan Wisata Talang Air.

Kata kunci: *stakeholder*, pariwisata, Wisata Talang Air.

**ANALISIS PERAN *STAKEHOLDER* DALAM PENGEMBANGAN
WISATA TALANG AIR PENINGGALAN KOLONIAL BELANDA
DI KELURAHAN PAJARESUK KABUPATEN PRINGSEWU**

Oleh

NI'MAH AULIA HIDAYAH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

**Judul Skripsi : ANALISIS PERAN *STAKEHOLDER*
DALAM PENGEMBANGAN WISATA
TALANG AIR PENINGGALAN KOLONIAL
BELANDA DI KELURAHAN PAJARESUK
KABUPATEN PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa : Ni'mah Aulia Hidayah

Nomor Pokok Mahasiswa : 1416041066

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

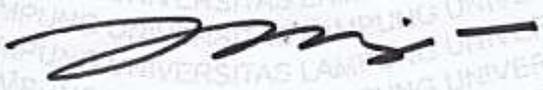


1. Komisi Pembimbing


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002


Simon Sumanjoyo H, S.AN., M.PA.
NIP 19810628 200501 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

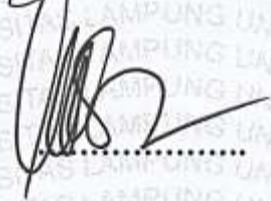

Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. 

Sekretaris : Simon Sumanjoyo H, S.AN., M.PA. 

Penguji Utama : Dra. Dian Kagungan, M.H. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Februari 2018

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Februari 2018
Yang membuat pernyataan,



Ni'mah Aulia Hidayah
NPM 1416041066

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ni'mah Aulia Hidayah di lahirkan di Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 29 Maret 1996. Peneliti merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Supriyono dan Ibu Hayuningsih. Pada saat ini peneliti bertempat tinggal di Desa Karangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu.

Peneliti memulai Pendidikan Formal di TK Seroja pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2002, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke SD Negeri 1 Rejosari dan tamat pada tahun 2008, setelah tamat dari pendidikan Sekolah Dasar, peneliti melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Pringsewu dan lulus pada tahun 2011, selanjutnya peneliti menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Pringsewu dan tamat pada tahun 2014, pada tahun 2014 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Sampai dengan penulisan Skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa berstatus aktif di jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MOTO

Barangsiapa ingin mutiara, harus berani terjun ke lautan yang dalam

(Ir. Soekarno)

Ketika saya merasa sudah tidak memiliki pilihan lain,

maka saya memilih untuk tidak menyerah

(Ni'mah Aulia Hidayah)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirroh im

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orangtua saya

Bapak Supriyono dan Ibu Hayuningsih

Yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya

tanpa henti.

Adik, keluarga besar, dan sahabat-sahabatku tercinta terima kasih

untuk semangat dan motivasinya.

Serta, Almamater saya Universitas Lampung yang saya banggakan.

SANWACANA

Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang selalu memberikan rahmat, karunia, dan hidayahNya yang tiada henti-hentinya kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Peran *Stakeholder* dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam banyak hal untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini antara lain:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahNya hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orangtua saya bapak Supriyono dan Ibu Hayuningsih yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya agar saya dapat meraih cita-cita dan mencapai kesuksesan.

3. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terima kasih atas arahan, motivasi dan dukungannya selama ini.
5. Ibu Intan Fitri Meutia, S.AN., MA., Ph.D selaku sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terima kasih atas arahan, motivasi, dan dukungannya selama ini.
6. Bapak Dr. Dedy Hermawan., S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing pertama, terima kasih atas bimbingan, dukungan, bantuan, nasihat, dan motivasi yang bapak berikan selama mengerjakan skripsi sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.AN., M.PA selaku dosen pembimbing kedua, terima kasih sudah dengan sabar membimbing peneliti, memberikan saran, nasihat dan dukungan yang bapak berikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H selaku dosen pembahas dan penguji, terima kasih atas arahan, kritik, saran, dan nasihat yang telah ibu diberikan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih telah banyak memberikan bantuan dan arahan kepada peneliti selama proses perkuliahan.

10. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terima kasih atas ilmu yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan.
11. Ibu Nur dan bapak Azhari selaku staf jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih telah banyak membantu kelancaran administrasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Untuk om Agus Niawan, S.Pd, Bulek Endah Normayanti, S.Pd, dan seluruh keluarga besar, terima kasih sudah memberikan doa dan sukungan yang begitu banyak selama Ni'mah menempuh pendidikan.
13. Kedua adikku, Bripda Ikhsan A'rof Filsafat terima kasih sudah menjadi motivasi dan saingan terbesar, dan Muhammad Yahya Ramadhan selalu semangat ya dek supaya cita-citamu tercapai.
14. Untuk Kevin Adi Wibowo mahasiswa Desain Interior UNS yang sedang berjuang menyelesaikan studinya, terima kasih sudah menjadi bagian dari usaha mewujudkan mimpi dan cita-citaku.
15. Sahabat-sahabatku Mutiara, Astri, Gusty, Okta, Rani, Devi, Nur, Suci, Yumas, Ririn, Septika, dan Daiska, terima kasih kita sudah berproses bersama dan banyak membantu aku dalam berbagai hal, semoga kita semua sukses.
16. Teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2014 dan seluruh teman-teman di jurusan Ilmu Administrasi Negara terima kasih untuk semangat dan semua cerita yang begitu berkesan.
17. Untuk Rista Inggar Pangestuti teman sejak SMA, terima kasih sudah belajar banyak hal selama menjadi mahasiswa, membantu dan menemani

selama penelitian, untuk Lina dan Yeni Lestari yang selalu bersedia mendengarkan cerita dan keluhanku, juga teman-teman alumni IPS 4 SMA Negeri 1 Pringsewu terima kasih sudah bertukar motivasi sampai sekarang.

18. Sahabat-sahabatku sejak kecil Wieka, Clivia, Dini, Dina, Dian, Merry, Zulfa, Indri, Yeni, Citra, Nana, dan seluruh teman-teman di Perumnas Podomoro selalu semangat untuk menempuh pendidikan dan meraih cita-cita ya.
19. Ulfa Umayasari, Resti pangestika, dan seluruh teman-teman alumni SMP Negeri 1 Pringsewu kelas 9.1 terima kasih sudah banyak berbagi cerita, semangat dan motivasi sampai saat ini.
20. Keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan keluarga besar Universitas Lampung, terima kasih telah membantu dan mendukung saya selama saya belajar di Universitas Lampung. Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun semoga bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan saran yang mendukung akan peneliti terima untuk perbaikan kedepannya, untuk seluruh kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang telah membantu peneliti, peneliti mungkin tidak akan mampu membalas semua kebaikan tersebut dan semoga Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang yang akan membalasnya aamiin.

Bandar Lampung, Februari 2018

Ni'mah Aulia Hidayah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACK	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan tentang <i>Stakeholder</i>	11
1. Konsep <i>Stakeholder</i>	11
2. Klasifikasi Peran <i>Stakeholder</i>	12
3. Analisis Peran <i>Stakeholder</i>	15
B. Tinjauan tentang Pariwisata	19
1. Konsep Pariwisata.....	19
2. Ekowisata	21
3. Dasar Pengembangan Pariwisata	23
4. Kepemimpinan dalam Pengembangan Pariwisata	27
5. Perencanaan Pengembangan Pariwisata	34
6. Kebijakan dan Langkah-Langkah Pengembangan Pariwisata	36
C. Kerangka Pikir	43
BAB III. METODE PENELITIAN	46
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	46
B. Fokus Penelitian	47

C. Lokasi Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Informan Penelitian	50
F. Teknik Pengumpulan Data	50
G. Teknik Analisis Data	53
H. Teknik Keabsahan Data	55
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, HASIL, DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kelurahan Pajaresuk	58
1. Kondisi Geografis dan Iklim	58
2. Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja Kelurahan Pajaresuk ..	59
3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kelurahan Pajaresuk	60
4. Kondisi Demografis (Kependudukan)	61
B. Hasil Penelitian	64
1. Identifikasi siapa saja <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam Pengembangan Wisata Talang Air di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu	64
2. Analisis mengenai apa saja yang dilakukan <i>stakeholder</i> dalam mengembangkan Wisata Talang Air di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu	77
C. Pembahasan	104
1. Identifikasi siapa saja <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam Pengembangan Wisata Talang Air di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu	104
2. Analisis mengenai apa saja yang dilakukan <i>stakeholder</i> dalam mengembangkan Wisata Talang Air di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu	116
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	142

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Empat Belas Titik Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Pringsewu	6
Tabel 2 Model Klasifikasi <i>Stakeholder</i> dari Wheeler dan Sillanpa.....	14
Tabel 3 Model Klasifikasi <i>Stakeholder</i> dari Mendelow, Johnson dan Scholes	15
Tabel 4 Daftar Informan Penelitian	50

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Matriks Analisis Peran <i>Stakeholder</i> dari Bryson.....	18
Gambar 2	Kerangka Pemikiran	45
Gambar 3	Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja Pemerintah Kelurahan Pajaresuk	59
Gambar 4	Susunan Kepengurusan Wisata Talang Air	66
Gambar 5	Jalan Masuk ke Lokasi Wisata Talang Air	67
Gambar 6	Warung Milik Masyarakat.....	70
Gambar 7	Baliho Wisata Talang Air dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu	72
Gambar 8	Empat Belas Titik Pariwisata Kabupaten Pringsewu	73
Gambar 9	Peta Identifikasi <i>Stakeholder</i> dalam Pengembangan Wisata Talang Air.....	76
Gambar 10	Arena Bermain Bebek Onthel	79
Gambar 11	Pemancingan dan Tempat Berfoto	80
Gambar 12	Kolam renang di Wisata Talang Air.....	81
Gambar 13	Loket Masuk dan Loket Keluar Wisata Talang Air	83
Gambar 14	Area Parkir Kendaraan Pengunjung	84
Gambar 15	Mushola dan Toilet.....	86

Gambar 16	Pagar pada Sisi Talang Air	87
Gambar 17	Jalan Alternatif	88
Gambar 18	Loket Kesekretariatan Wisata Talang Air	89
Gambar 19	Jalur Khusus Pejalan Kaki.....	90
Gambar 20	Baliho sebagai Alat Promosi Wisata Talang Air.....	93
Gambar 21	Panggung Kesenian	94
Gambar 22	Kios Cinderamata	95
Gambar 23	Pagar Pembatas.....	96
Gambar 24	Kotak Sampah	97
Gambar 25	Pagar Tembok.....	100
Gambar 26	Banner Sponsor dari CV. Syam.....	100
Gambar 27	Banner Promosi dari Serupadia	101
Gambar 28	Peta Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengembangan Wisata Talang Air.....	103
Gambar 29	Keramaian Pengunjung di Wisata Talang Air.....	106
Gambar 30	Talang Air di Desa Pajaresuk	108
Gambar 31	Tahapan Pengembangan Wisata Talang Air	110
Gambar 32	Matriks Analisis Peran <i>Stakeholder</i> Wisata Talang Air.....	118
Gambar 33	Model Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengembangan Pariwisata (Studi Kasus pada Wisata Talang Air di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu)	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan melibatkan berbagai pelaku dalam proses pelaksanaannya, pelaku atau aktor dalam pembangunan disebut sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Peran *stakeholder* dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan dibidang pariwisata, salah satu *stakeholder* yang berperan dalam pembangunan pariwisata adalah pemerintah namun pemerintah memiliki keterbatasan seperti yang dikemukakan Widodo (2015:37) yakni: (1) keterbatasan finansial; (2) keterbatasan teknis; (3) keterbatasan kejangkauan program, dengan demikian peran *stakeholder* di luar pemerintah dibutuhkan agar tujuan pembangunan pariwisata dapat terwujud.

Stakeholder yang dapat ikut andil dalam pengembangan pariwisata selain pemerintah adalah masyarakat sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Muljadi (2012:25) bahwa kepariwisataan Indonesia berorientasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga kekuatan inti pariwisata Indonesia berada ditangan rakyat atau disebut pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat (*Community Based Tourism Development*), hal ini sesuai dengan

yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 bahwa pengembangan pariwisata dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan meningkatkan kesadaran serta peran masyarakat.

Pelaksanaan pengembangan pariwisata hendaknya mampu mendekatkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat atau yang disebut dengan pendekatan *bottom up*. Menurut Korten dalam Sulistiyani (2017:37) pendekatan *bottom up* memposisikan masyarakat sebagai pusat pembangunan atau pusat perubahan sehingga terlibat di dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi, pendekatan ini disebut juga sebagai *people centered development*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 pada aspek kelembagaan juga dijelaskan bahwa pengembangan pariwisata dilaksanakan dengan melakukan kerjasama antara organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sehingga dengan memberikan peran yang setara antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat pengembangan pariwisata.

Pemerintah dan masyarakat berperan sebagai *stakeholder* dalam mengembangkan kepariwisataan. Pemerintah berperan dalam pembuatan regulasi, melakukan pengawasan, membuat kebijakan, mempersiapkan sumber daya manusia, sebagai salah satu faktor pendukung dalam mengembangkan suatu destinasi pariwisata, serta pemerintah juga berperan memotivasi dan mendorong Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta masyarakat untuk ikut

berpartisipasi dalam mengembangkan kepariwisataan. Sedangkan peran masyarakat menurut Muljadi (2012:27) adalah pelaku aktif dalam kegiatan kepariwisataan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. (sumber: <https://ojs.unud.ac.id> diakses pada tanggal 21 September 2017).

Perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, kemajuan dibidang pariwisata menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur sehingga pengembangan pariwisata menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Pengembangan pariwisata di Indonesia telah diatur dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, yakni: (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan serta pemerataan pembangunan dibidang pariwisata; (2) mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup; (3) meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar; (4) menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan (*accountable*). (sumber: <http://www.kemenpar.go.id> diakses pada tanggal 29 Agustus 2017).

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dijelaskan bahwa Pariwisata di Provinsi Lampung merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan, mengingat daerah ini memiliki potensi wisata yang beragam, baik wisata alam, wisata buatan, agrowisata, maupun wisata budaya. Pemanfaatan potensi-potensi tersebut untuk menjadi daya tarik wisata yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap usaha pembangunan Provinsi Lampung yang masih menghadapi kendala dan tantangan.

Selanjutnya di dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata juga dijelaskan bahwa pembangunan usaha kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Lampung yang dilakukan melalui perencanaan menyeluruh dan kerangka kerja sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Pengembangan dan pembangunan pariwisata juga memegang peranan penting dalam pembangunan daerah, sehingga pembangunan dalam sektor ini memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pringsewu merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan program transmigrasi pada zaman kolonisasi Belanda pada tahun 1905 sehingga sampai kini Pringsewu dihuni oleh mayoritas suku Jawa. Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang masih muda usianya hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, sebagai kabupaten baru yang sedang

giat-giatnya membangun kemajuan Kabupaten Pringsewu dinilai cukup pesat diberbagai bidang termasuk bidang pariwisata. Menurut Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu bahwa:

“Memang tempat wisata di Kabupaten Pringsewu ini hanya sedikit karena Kabupaten Pringsewu yang secara geografis berada di tengah dan dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Lampung sehingga daerah Pringsewu tidak memiliki pantai otomatis tempat wisata di Pringsewu tidak terlalu banyak karena di Pringsewu tidak ada wisata bahari, namun dengan kreativitas warganya dan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu bisa menggali dan mengembangkan potensi wisata yang ada. Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan Pemerintah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu kini mampu membawa Pringsewu bersaing dengan kabupaten lainnya di Lampung dengan memunculkan tempat-tempat wisata yang unik dan menarik sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan baik yang berasal dari Pringsewu maupun dari luar Pringsewu terutama anak-anak muda yang senang berlibur dan *hunting foto*” (*hasil wawancara pada hari selasa tanggal 5 September 2017*).

Pemerintah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu telah menetapkan empat belas objek pariwisata yang akan dikembangkan menjadi objek wisata unggulan daerah Kabupaten Pringsewu, objek-objek wisata tersebut tersebar diberbagai daerah di Kabupaten Pringsewu sehingga diberi nama program empat belas titik pariwisata unggulan daerah Kabupaten Pringsewu.

Tabel 1. Empat Belas Titik Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Pringsewu

No	Nama Objek Wisata	Lokasi
1	Talang	Pajaresuk
2	Goa Bunda Maria	Pajaresuk
3	Makam KH. Gholib	Pringsewu Utara
4	Pendopo	Pusat Kota Pringsewu
5	Wisata Balanja dan Kuliner	Pringsewu
6	Rumah Adat Pardasuka	Pardasuka
7	Rumah adat Margakaya	Margakaya
8	Rumah Adat Jawa	Gadingrejo
9	Kampoeng Gerabah	Pringsewu
10	Gupit	Gadingrejo
11	Pure	Gadingrejo
12	Telaga Ngudi Rukun	Sukoharjo
13	Tugu Selamat Datang	Gadingrejo
14	Kampoeng Kain Perca	Banyumas

Sumber: diolah oleh peneliti dari hasil wawancara tahun 2017

Salah satu tempat wisata di Kabupaten Pringsewu yang saat ini sedang ramai dikunjungi oleh para wisatawan adalah Wisata Talang Air peninggalan kolonial Belanda yang terletak di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu. Talang air di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu dikembangkan menjadi satu objek wisata unggulan daerah Kabupaten Pringsewu yang ikut dipromosikan kedalam program empat belas titik pariwisata unggulan daerah Kabupaten Pringsewu oleh Pemerintah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.

Talang Air dibangun pada tahun 1928 oleh pemerintah kolonial Belanda yang pada saat itu digunakan untuk keperluan pertanian di Pringsewu karena wilayah Pringsewu yang berbukit-bukit dan di antara bukit dengan bukit lainnya dipisahkan oleh lembah maka pemerintah kolonial Belanda membangun jaringan irigasi berupa talang air untuk mengalirkan air dari

bukit satu ke bukit lainnya. Menurut sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu bahwa:

“Talang air tersebut dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda terbuat dari besi berbentuk setengah silinder lalu disangga dengan tiang-tiang besi yang ditanam di dalam tanah yang diberi beton sehingga dapat berdiri dengan kokoh, di atas silinder itu ditaruh besi-besi yang di atas besi-besinya ditaruh papan sehingga talang air ini selain berfungsi sebagai saluran irigasi masyarakat dapat memanfaatkannya menjadi jembatan alat penghubung transportasi untuk melintas di atasnya, talang air tersebut lumayan tinggi yaitu sekitar 25 meter dan panjang sekitar 100 meter, talang air hasil buatan teknologi Belanda tersebut cukup kokoh sehingga bangunan itu masih bisa berfungsi dan berdiri sampai saat ini”. *(hasil wawancara pada hari selasa tanggal 5 September 2017).*

Di Kabupaten Pringsewu ada lima talang air yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda yaitu: dua di Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu, dua di Desa Bumiayu Kecamatan Pringsewu, dan satu di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran, dari kelima talang tersebut yang paling terkenal adalah talang air yang berada di Kelurahan Pajaresuk karena letaknya yang lebih mudah dijangkau, lebih strategis, dan lebih dekat dengan jalan raya. Menurut pengelola Wisata Talang Air bahwa:

“Sebelum diresmikan sebagai tempat wisata, talang air peninggalan kolonial Belanda tersebut memang sudah ramai dikunjungi oleh wisatawan, namun karena akses masuknya sulit disebabkan belum adanya jalan utama menuju talang air masyarakat yang tinggal di daerah sekitar talang air mulai melakukan pembukaan jalan dan penataan lokasi di sekitar talang air, masyarakat berperan sebagai pihak yang mengawali mengembangkan Wisata Talang Air namun karena keterbatasan dana dan talang air yang merupakan aset daerah maka pemerintah lah yang berhak meresmikan talang air sebagai tempat wisata sehingga dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah”. *(Hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017).*

Di sisi lain pemerintah Kabupaten Pringsewu juga melihat adanya potensi wisata yang bisa dikembangkan di lokasi talang air sehingga pemerintah bekerjasama dengan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi talang air untuk mengembangkan talang air menjadi salah satu tempat wisata daerah Pringsewu. Pengembangan Wisata Talang Air juga dilakukan sebagai upaya melestarikan aset daerah yang berupa peninggalan sejarah agar tidak punah.

Selain bentuknya yang unik dan bangunannya yang masih asli peninggalan zaman kolonial Belanda sehingga memiliki nilai sejarah, daya tarik lainnya dari talang air yang berada di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu adalah karena panorama alamnya yang indah. Talang air yang menghubungkan dua bukit dengan sungai kecil di bawahnya, ditambah suasana alam pedesaan yang sejuk menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, dengan demikian Wisata Talang Air memiliki potensi pesona alam yang cukup untuk terus dikembangkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti tertarik untuk mengetahui siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan Wisata Talang Air dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Townsley yang indikator-indikatornya yaitu: *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder, dan peneliti juga ingin mengetahui apa saja peran *stakeholder* dalam proses pengembangan Wisata Talang Air dan pembangunan *spot-spot* wisata di sekitar talang air serta fasilitas yang mulai dibangun untuk memberikan pelayanan senyaman mungkin bagi pengunjung dengan menggunakan teori

stakeholder yang dikembangkan oleh Bryson yang indikator-indikatornya yaitu: *Contest setter*, *Player*, *Subject* dan *Crowd*, sehingga penulis memilih judul “**Analisis Peran *Stakeholder* dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan Wisata Talang Air di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu?
2. Apa saja yang dilakukan *stakeholder* dalam mengembangkan Wisata Talang Air di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan Wisata Talang Air di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang dilakukan *stakeholder* dalam mengembangkan Wisata Talang Air di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan dalam khasanah Ilmu Administrasi Negara, terutama tentang studi peran pemangku kepentingan (*stakeholder*).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu dalam mengembangkan objek-objek wisata di daerah Kabupaten Pringsewu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang *Stakeholder*

1. Konsep *Stakeholder*

Definisi *stakeholder* menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Hetifah dalam Reski dkk (2016:160) *stakeholder* dimaknai sebagai individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (Secara positif maupun negatif) oleh kegiatan atau program pembangunan.
- b. Menurut Freeman dalam Oktavia dan Saharuddin (2013:233) bahwa *stakeholder* merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program.
- c. Gonslaves dalam Iqbal (2007:90) mendeskripsikan *stakeholder* atas siapa yang memberi dampak dan/atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Mereka bisa laki-laki atau perempuan, komunitas, kelompok sosial ekonomi, atau lembaga dalam berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat. Setiap kelompok ini memiliki sumber daya dan kebutuhan masing-

masing yang harus terwakili dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan.

- d. Reed *et al* dalam Santoso dkk (2015:200) berpendapat bahwa *stakeholder* adalah pihak yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh capaian dari sasaran organisasi.
- e. Menurut Fletcher *et al* dalam Santoso dkk (2015:200) *stakeholder* merupakan orang dengan pertimbangan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam kegiatan atau yang terkena dampak baik positif maupun negatif dari hasil pelaksanaan kegiatan.

2. Klasifikasi Peran *Stakeholder*

Klasifikasi peran *stakeholder* menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Crosby dalam Iqbal (2007:90), pemangku kepentingan (*stakeholder*) dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:
 1. Pemangku kepentingan utama, yakni yang menerima dampak positif atau negatif (di luar kerelaan) dari suatu kegiatan.
 2. Pemangku kepentingan penunjang, adalah yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan. Mereka dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi advokasi seperti organisasi pemerintahan, LSM, dan pihak swasta. Dalam beberapa

kegiatan, pemangku kepentingan penunjang dapat merupakan perorangan atau kelompok kunci yang memiliki kepentingan baik formal maupun informal.

3. Pemangku kepentingan kunci, yakni yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan.

b. Menurut Townsley dalam Wakka (2014:50) mengklasifikasikan *stakeholder* menjadi dua yaitu:

1. *Stakeholder* primer adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap sumber daya, baik sebagai mata pencaharian ataupun terlibat langsung dalam eksploitasi.
2. *Stakeholder* sekunder adalah pihak yang memiliki minat atau kepentingan secara tidak langsung, atau pihak yang tergantung pada sebagian kekayaan atau bisnis yang dihasilkan oleh sumber daya.

c. Menurut Santoso dkk (2015:201) pemangku kepentingan (*stakeholder*) dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. *Key player*, merupakan pemangku kepentingan yang aktif karena mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek.
2. *Context setter*, memiliki pengaruh yang tinggi tapi sedikit kepentingan sehingga dapat menjadi risiko signifikan untuk dipantau.

3. *Crowd*, merupakan pemangku kepentingan yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.
- d. Menurut Wheeler dan Sillanpaa dalam Heene dkk (2015:158) mengklasifikasikan *stakeholder* menjadi *stakeholder* primer dan sekunder, yang boleh jadi menampilkan sosok yang berkarakteristik sosial atau nirsosial.

Tabel 2. Model Klasifikasi Stakeholder dari Wheeler dan Sillanpaa

	SOSIAL	NONSOSIAL
PRIMER	-para investor -para personil -para pelanggan -masyarakat setempat -penyuplai dan rekan bisnis, dan sebagainya	-lingkungan fisik -generasi penerus, dan sebagainya
SEKUNDER	-penyusunan aturan -kelompok kepentingan -media -para ilmuwan -para pesaing, dan sebagainya	-lingkungan organisasi -organisasi pecinta binatang, dan sebagainya

Sumber: Heene dkk (2015:158)

- e. Mendelow, Johnson dan Scholes dalam Heene dkk (2015:159) mengklasifikasikan *stakeholder* di satu sisi berdasarkan kekuasaannya atas organisasi, serta disisi lainnya mengacu seberapa besaran (bobot) kepentingannya bagi organisasi dan apa yang tengah dilakukan organisasi.

Tabel 3. Model Klasifikasi *Stakeholder* dari Mendelow, Johnson dan Scholes

	KEPENTINGAN D- PELAKU KUNCI	
	RENDAH	TINGGI
RENDAH	A- Usaha yang minimal	B-Selalu terinformasikan
TINGGI	C- Mempertahankan kepuasan	D-Pelaku kunci

Sumber: Heene dkk (2015:159)

- f. Menurut Mitchel, Abell dan Wood dalam Heene dkk (2015:161-162) memperkenalkan suatu klasifikasi yang mengacu kepada tiga kecenderungan perilaku yang menonjol dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Mereka menarik kesimpulan bahwa kepentingan relatif para *stakeholder* dipengaruhi oleh kecenderungan yang dominan dari karakteristik-karakteristik perilaku pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang menonjolkan unsur kekuasaan, legitimasi, ataupun urgensi, serta terbuka pula kemungkinan saling berkomunikasi diantara ketiganya.

3. Analisis Peran *Stakeholder*

Analisis peran *stakeholder* dilakukan untuk mengungkapkan kepentingan dan pengaruh (peranan) para *stakeholder*. Overseas Development Administration dan Grimble dalam Fitri dkk (2015:106) mengidentifikasi analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai metodologi untuk memperoleh pemahaman atas sebuah sistem dan untuk menilai dampak perubahan pada sistem tersebut, juga sebagai suatu cara untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) kunci tersebut.

Menurut Reed *et al* dalam Fitri dkk (2015:106) analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah suatu proses untuk mengidentifikasi individu, kelompok dan organisasi yang dipengaruhi atau dapat memengaruhi lingkungan dan generasi yang akan datang serta memprioritaskan individu-individu dan kelompok untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, selanjutnya Reed *et al* dalam Oktavia dan Saharudin (2013:233) mengemukakan analisis *stakeholder* dapat dilakukan dengan cara:

1. Melakukan identifikasi *stakeholder*
2. Mengelompokkan dan membedakan antar *stakeholder*
3. Menyelidiki hubungan antar *stakeholder*

Menurut Santoso dkk (2015:200) analisis *stakeholder* dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi para pemangku kepentingan (*stakeholder*)
2. Mengelompokkan dan mengategorikan para pemangku kepentingan (*stakeholder*)
3. Menggambarkan hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*)

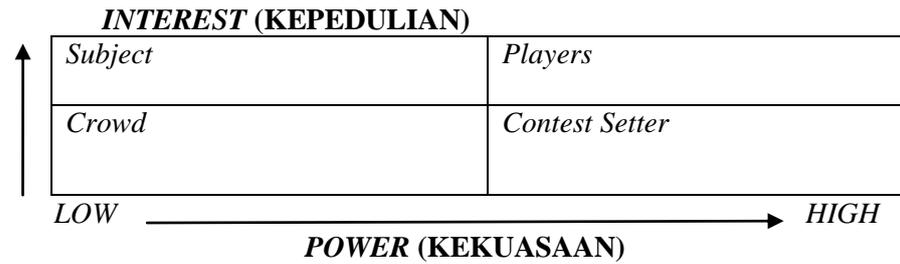
Groenendjik dalam Oktavia dan Saharudin (2013:233) mengembangkan metode pendekatan untuk mengetahui peranan dan fungsi *stakeholder* dengan terlebih dahulu mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dan mengklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya secara langsung/tidak langsung dengan proyek yang ada. Kemudian tiap *stakeholder* yang

berbeda tersebut tentunya memiliki atribut yang berbeda untuk dikaji sesuai dengan situasi dan tujuan dari analisis, atribut yang dimasukkan dalam analisis adalah pengaruh (*power*) dan kepentingan (*importance*).

Menurut Race dan Millar dalam Iqbal (2007:92) analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*) bermanfaat dalam pengidentifikasian komunitas atau kelompok masyarakat yang paling banyak terkena pengaruh (dampak) dari suatu kegiatan pembangunan. Race dan Millar di kutip Iqbal (2007:92) menekankan beberapa intisari dalam analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Pemangku kepentingan itu sendiri (individu atau kelompok yang memiliki atau terkena pengaruh dari kegiatan pembangunan)
2. Partisipasi (keterlibatan)
3. Keterkaitan sebagai bentuk dari partisipasi yang bersifat lebih dari sekedar konsultasi

Menurut Bryson dalam Hardiansyah (2012:190) analisis peran pemangku kepentingan (*stakeholder*) dimulai dengan menyusun *stakeholder* pada matriks dua kali dua menurut *interest* (minat) *stakeholder* terhadap suatu masalah dan *power* (kekuasaan) *stakeholder* dalam mempengaruhi masalah tersebut. *Interest* adalah minat atau kepentingan *stakeholder* terhadap pembangunan, sedangkan yang dimaksud dengan *power* adalah kekuasaan *stakeholder* untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan maupun peraturan-peraturan pembangunan.



Gambar 1. Matriks Analisis Peran Stakeholder dari Bryson
 Sumber: Hardiansyah (2012:191)

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Contest setter* , memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi risiko yang signifikan untuk harus dipantau.
2. *Players*, merupakan *stakeholder* yang aktif karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek/program.
3. *Subject*, memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Namun mereka dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi dengan *stakeholder* lainnya.
4. *Crowd*, merupakan *stakeholder* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Pengaruh dan kepentingan akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan.

B. Tinjauan tentang Pariwisata

1. Konsep Pariwisata

Secara *etymologis* kata “pariwisata” berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yakni, *Pari* berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, *wisata* berarti pergi terus menerus, mengembara. Jadi pariwisata berarti perjalanan atau bepergian yang dilakukan secara berkali-kali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pengertian pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Definisi pariwisata menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut McIntosh dalam Muljadi (2012:7) pariwisata merupakan “ *a composite of activities, services and industries that delivers a travel experience: transportation, accommodation, eating and drinking establishment, shops, entertainment, activity, and other hospitality service available for individuals or group that are away from home*” (aktivitas, pelayanan dan produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan: transportasi, akomodasi, pendirian tempat makanan dan minuman, toko, hiburan, kegiatan, dan lainnya jasa perhotelan yang tersedia bagi individu atau kelompok yang berada jauh dari rumah).

- b. Menurut Hunziger dan Kraft dalam Muljadi (2012:8) pariwisata adalah *“the totality of relationship and phenomena arising from the travel and stay of strangers, provided the stay does not empty the establishment permanent residence and is not connected with a remunerated activity”* (keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing dan perjalanannya itu tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari nafkah).
- c. Norval dalam Muljadi (2012:8) menyatakan bahwa pariwisata atau *tourism* adalah *“the sum total of operations, mainly of an economic nature, which directly relate to the entry, stay and movement of foreigners inside and outside a certain country, city or region”* (keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu negara, kota, atau wilayah tertentu).
- d. World Tourism Organization (WTO) dalam Muljadi (2012:9) mendefinisikan pariwisata sebagai *“the activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes”* (aktivitas yang dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal diluar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis, dan keperluan lain).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang dalam sementara waktu ke lain daerah dari tempat tinggalnya dengan tujuan bukan untuk bekerja atau mencari nafkah.

2. Ekowisata

Menurut Yoeti (2016:195) ekowisata diartikan sebagai pariwisata berwawasan lingkungan. Maksudnya, melalui aktivitas yang berkaitan dengan alam, wisatawan diajak melihat dan menyaksikan alam dari dekat, menikmati keaslian alam dan lingkungannya sehingga membuatnya tergugah untuk mencintai alam.

Yoeti (2016:195) menjelaskan bahwa ekowisata dalam penyelenggaraannya tidak menuntut tersedianya fasilitas akomodasi yang *modern* atau *lux* yang dilengkapi dengan perlengkapan yang mewah atau bangunan *artificial* yang berlebihan, semuanya disesuaikan dengan alam sekitarnya. Pada dasarnya penyelenggaraan dilakukan secara sederhana, yang menonjol adalah memelihara keaslian lingkungan tanpa merusak alam, fauna dan flora, memelihara keaslian seni budaya tradisional masyarakat sekitar, dan terciptanya ketenangan, sehingga tercipta keseimbangan antara kehidupan manusia dengan alam di sekitarnya.

Menurut Yoeti (2016:196) ada empat unsur yang dianggap penting dalam pariwisata yaitu:

1. Pro-aktif
2. Kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup
3. Adanya keterlibatan penduduk lokal
4. Adanya unsur pendidikan

Emil Salim dalam Yoeti (2016:196) menyatakan bahwa ekowisata memiliki ciri khusus yaitu:

1. Objek yang dilihat atau disaksikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan alam atau lingkungan termasuk di dalamnya flora dan fauna, sumber-sumber hayati yang tersedia, kondisi sosial, ekonomi dan seni budaya masyarakat disekitar proyek yang memiliki unsur-unsur keaslian, langka, dan unik serta berbeda dengan yang lain.
2. Keikutsertaan seorang wisatawan berkaitan dengan keingintahuan (*curiocity*), pendidikan (*education*), kesenangan (*hobby*), dan penelitian (*research*) tentang sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar proyek.
3. Adanya keterlibatan penduduk setempat seperti dalam penyediaan penginapan, penyediaan barang-barang kebutuhan pengunjung, memelihara lingkungan sekitar serta bertindak sebagai instruktur atau pemandu.
4. Proyek pengembangan ekowisata harus dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat di sekitar proyek ekowisata diadakan.
5. Proyek ekowisata harus sekaligus dapat melestarikan lingkungan, mencegah pencemaran lingkungan, seni dan budaya, atau mengurangi gejolak sosial dan harus memelihara ketertiban, keamanan dan kenyamanan pengunjung yang datang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah bahwa prinsip pengembangan ekowisata meliputi:

1. Kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata.
2. Konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam yang digunakan untuk ekowisata.
3. Ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat menjadi penggerak dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan.
4. Edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggungjawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.
5. Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung.
6. Partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan.
7. Menampung kearifan lokal.

3. Dasar Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik objek wisata agar berkembang dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu

lingkungan hidup. Menurut Muljadi (2012:32) untuk mewujudkan pengembangan pariwisata harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
2. Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.
4. Kelanjutan dari usaha pariwisata itu sendiri.

Menurut Yoeti (2016:77) ada tiga alasan mengapa pengembangan pariwisata itu penting adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut, dengan kata lain pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak.
2. Pengembangan pariwisata lebih banyak bersifat non ekonomis, salah satu motivasi wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata adalah untuk menyaksikan dan melihat keindahan alam dan termasuk di dalamnya cagar alam, kebun raya, tempat bersejarah dan candi-candi, bangunan-bangunan kuno, perkebunan dan sawah ladang. Semuanya itu memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pemeliharaan dan perawatan, dengan

majunya pariwisata sebagai suatu industri, biaya yang besar untuk perbaikan, pemeliharaan, restorasi dan pengembangan objek dan atraksi wisata akan dapat diperoleh dari hasil kegiatan kepariwisataan.

3. Pengembangan pariwisata perlu untuk menghilangkan kepicikan berpikir, mengurangi salah pengertian, dapat mengetahui tingkah laku orang lain yang datang berkunjung, terutama bagi masyarakat dimana proyek kepariwisataan itu dibangun. Pertukaran pikiran dan adanya interaksi antara wisatawan yang datang dengan penduduk setempat akan dapat membuka mata penduduk sekitarnya dalam banyak hal.

Pengembangan pariwisata Indonesia dimaksudkan agar objek wisata yang sedemikian banyaknya dimiliki oleh Indonesia dapat dikenal baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia serta dapat didayagunakan secara optimal dengan tetap menjaga keutuhan dan keasliannya, serta menghindarkan dari kerusakan-kerusakan lingkungan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan Indonesia adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Menghapus kemiskinan
4. Mengatasi pengangguran
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
6. Memajukan kebudayaan

7. Mengangkat citra bangsa
8. Memupuk rasa cinta tanah air
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
10. Mempererat persahabatan antarbangsa

Berdasarkan Undang-undang tersebut penyelenggaraan pengembangan pariwisata dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, serta hubungan antara manusia dan lingkungan.
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal.
3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proposionalitas.
4. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
5. Memberdayakan masyarakat setempat.
6. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistem dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan.
7. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.
8. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata, prioritas pengembangan kawasan pariwisata didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Akseibilitas
2. Amenitas/fasilitas
3. *Ancillary*/kelembagaan
4. Daya tarik wisata
5. Kesiapan masyarakat
6. Era/*trend* yang berkembang

4. Kepemimpinan dalam Pengembangan Pariwisata

Menurut Yoeti (2016:320-324) Beberapa keadaan yang menyebabkan kepemimpinan menjadi *issue* penting dalam pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Kualitas manusia dan kualitas masyarakat sangat menentukan intensitas, kualitas, dan kapasitas kepariwisataan.

Manusia dan masyarakat memerlukan kepemimpinan, sedangkan benda-benda fisik hanya memerlukan pengeolaan atau manajemen. Kepemimpinan diperlukan apabila diyakini bahwa kemajuan kepariwisataan sangat ditentukan oleh kualitas manusia dan masyarakat yang terlibat di dalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Untuk pengembangan kepariwisataan diperlukan adanya kesadaran baru, kepekaan baru, keyakinan dan sikap baru.

Ada kalanya kepariwisataan di suatu daerah tidak berkembang seperti yang diharapkan, bukan karena tidak ada pemandangan atau pantai yang indah, atau hotel yang mewah atau pekerja hotel yang kompeten, namun karena sikap lingkungan masyarakatnya yang tidak mendukung. Sikap ini sering kali berkaitan dengan kesadaran dan keyakinan yang ada pada masyarakat. Kepemimpinan diperlukan apabila faktor yang dipandang berpengaruh terhadap kepariwisataan adalah berkaitan dengan kesadaran, kepekaan, keyakinan, dan sikap masyarakat.

3. Kepariwisata diharapkan tidak hanya membawa manfaat jangka pendek namun juga membawa manfaat jangka panjang.

Banyak keberatan yang dilontarkan oleh beberapa pihak terhadap pengembangan kepariwisataan akan membawa dampak negatif jangka panjang terhadap daerah atau masyarakat tujuan wisata. Kepemimpinan diperlukan apabila keputusan dan tindakan untuk mendapatkan manfaat jangka pendek dalam bidang kepariwisataan diharapkan tidak akan menimbulkan dampak negatif jangka panjang yang jauh lebih besar dari manfaat jangka pendek yang sudah dinikmati.

4. Kepariwisata diharapkan dapat membawa dampak *positive sum* bukan *zero sum* atau *negative sum*.

Salah satu hal yang tidak diinginkan adalah pengembangan kepariwisataan yang di satu pihak membawa manfaat, namun dipihak lain membawa kerugian yang jauh lebih besar terhadap

negara atau masyarakat (*negative sum*). Kepemimpinan diperlukan untuk mencegah sejak awal terjadinya *negative sum* dan memperbesar kemungkinan terjadinya *positive sum*, dalam arti pengembangan kepariwisataan memang membawa manfaat keseluruhan lebih besar bagi semua pihak terkait.

5. Kepariwisataaan hendak diarahkan ke pemenuhan kebutuhan manusia pada hierarki yang lebih tinggi, bukan pada hierarki yang lebih rendah.

Alasan orang melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah beraneka ragam. Ada orang berpergian untuk memenuhi kebutuhan yang berada pada hierarki bawah seperti kebutuhan fisiologis, ada orang melakukan perjalanan untuk memenuhi kebutuhan pada hierarki yang lebih tinggi, seperti kebutuhan akan status, dan mendapatkan makna yang lebih besar dari kehidupan ini karena dari perjalanan ini orang yang bersangkutan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru yang unik (dalam kelompok ini termasuk perjalanan ziarah ke tempat-tempat yang dipandang mempunyai nilai spiritual atau *historic* yang tinggi). Kepemimpinan diperlukan untuk menjadikan kepariwisataan sebagai kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pada hierarki yang lebih tinggi dan tidak terjebak pada kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pada hierarki yang lebih rendah.

6. Perkembangan kepariwisataan diharapkan berjalan berdampingan dan sejalan dengan penguatan jati diri bangsa.

Salah satu ketakutan yang ada pada sekelompok masyarakat dalam hal ini adalah bahwa perkembangan kepariwisataan menjadi tidak terkendali dan sebagai akibatnya peningkatan pendapatan negara dari kepariwisataan ini harus dibayar mahal dengan hilangnya identitas atau jatidiri masyarakat di daerah tujuan wisata atau lunturnya unsur-unsur pembentukan jati diri bangsa. Kepemimpinan diperlukan apabila perkembangan kepariwisataan diharapkan berjalan berdampingan dengan penguatan jatidiri masyarakat atau bangsa.

7. Pelaku pariwisata di Indonesia diharapkan dapat menguasai kegiatan yang membawa nilai tambah lebih tinggi, bukan hanya puas pada kegiatan yang membawa nilai tambah rendah.

Kegiatan kepariwisataan menyangkut banyak mata rantai nilai. Ada mata rantai yang membawa nilai tinggi, ada mata rantai yang bernilai relatif rendah. Mata rantai yang bernilai tinggi biasanya dipegang oleh mereka yang memiliki pengetahuan dan keahlian tinggi dan jaringan bisnis atau sosial yang luas. Masyarakat yang modal utamanya adalah kekuatan atau keterampilan fisik saja hanya bisa masuk ke kegiatan-kegiatan pada mata rantai yang bernilai relatif rendah. Kepemimpinan diperlukan apabila masyarakat dan sektor swasta Indonesia ingin masuk lebih jauh ke mata rantai yang membawa nilai lebih tinggi.

8. Manfaat perkembangan kepariwisataan diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh sekelompok kecil orang saja.

Kunjungan wisatawan akan meningkatkan pendapatan suatu daerah tujuan wisata, namun persoalannya, seberapa jauh manfaat ini dinikmati oleh masyarakat luas, apabila masyarakat luas tidak terlibat dalam kegiatan kepariwisataan, maka mereka akan tidak termasuk dalam kelompok yang menikmati manfaat perkembangan kepariwisataan daerahnya. Atau apabila kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan pendapatan yang diperoleh dari kepariwisataan kurang memihak kepentingan masyarakat luas, maka kepariwisataan hanya akan menguntungkan sekelompok orang saja.

9. Dalam bidang kepariwisataan masyarakat Indonesia ingin menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, bukan tamu di rumah sendiri.

Perkembangan kepariwisataan dalam dunia yang makin tanpa batas akan meningkatkan arus modal, dan arus tenaga profesional dalam kepariwisataan ke Indonesia. Di balik modal dan keahlian tersebut biasanya ada keinginan untuk mempengaruhi kebijakan kepariwisataan agar modal dan keahlian itu membawa keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pihak yang memilikinya. Apabila para pembuat kebijakan dan pelaku pariwisata Indonesia, baik yang ada di sektor swasta maupun masyarakat, tidak bisa mengimbangi kecerdasan pihak-pihak luar yang hendak mempengaruhi kebijakan

kepariwisataan di Indonesia dimasa depan kendalanya secara berangsur-angsur akan pindah ke pihak lain. Di samping itu, tanpa konsep pengembangan kepariwisataan yang jelas, bukan mustahil apabila masyarakat di daerah tujuan wisata akan tersingkir dan mereka akan menjadi tamu di rumah mereka sendiri.

Menurut Yoeti (2016:328-329) ada tiga karakteristik kepemimpinan yang diperlukan dalam pengembangan pariwisata yang bertumpu pada kualitas manusia dan masyarakat, yaitu karakteristik kepemimpinan transformasional, sinergistik, dan visioner.

Kepemimpinan transformasional menggerakkan masyarakat atau institusi yang dipimpinnya menuju keadaan yang lebih baik dengan:

1. Mengembangkan dan menguatkan kesadaran tentang potensi (dalam hal ini potensi yang berkaitan dengan kepariwisataan) yang mereka miliki untuk membangun masa depan yang lebih baik.
2. Membantu atau mengembangkan lingkungan atau iklim atau suasana yang dapat mendorong dan memudahkan anggota komunitas atau institusi mengerahkan potensi terbaiknya.
3. Mengembangkan lingkungan atau iklim atau suasana yang mendorong dan memudahkan komunitas atau institusi untuk belajar bersama dan melakukan inovasi.
4. Menjadikan pengembangan kepariwisataan tidak hanya sebagai kegiatan bisnis namun sebagai kesempatan bagi sebuah komunitas

atau institusi untuk mengembangkan unsur-unsur sosio-kultural yang menunjukkan jatidiri komunitas atau institusinya.

5. Meningkatkan kemampuan komunitas atau institusi untuk menanggapi perubahan agar mereka dapat menjadikan perubahan sebagai peluang untuk mencapai kemajuan dan mengurangi kemungkinan terjebak menjadi korban perubahan.

Kepemimpinan sinergistik mencapai kemajuan dengan meningkatkan kemampuan bekerjasama secara kreatif baik di dalam komunitas atau institusinya, maupun kerjasama kreatif antar komunitas dan antar institusi.

Hal ini dilakukan dengan:

1. Membangun dan mengembangkan rasa saling percaya dan perasaan saling membutuhkan (*Sense of interdependence*).
2. Membangun jejaring kerjasama di antara pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan, serta berbagi informasi yang diperlukan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan meningkatkan kualitas keputusan bersama.
3. Menemukan landasan pijakan bersama (*common platform*) diantara kelompok-kelompok komunitas atau institusi-institusi yang berbeda-beda.
4. Memperkuat semangat tumbuh dan berkembang bersama dalam arti kesediaan untuk mendistribusikan secara adil hasil-hasil kemajuan kepada semua pihak yang berkontribusi dan ketulusan untuk berkontribusi dalam usaha-usaha untuk mencapai kemajuan.

Kepemimpinan visioner memberikan arah pada pengerahan potensi masyarakat dan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk meraih masa depan yang lebih baik, dengan:

1. Membangun dan mengembangkan kesepakatan mengenai karakteristik masa depan yang jauh lebih baik yang hendak dicapai bersama.
2. Mengembangkan kesadaran dan pemahaman mengenai dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil, tindakan, sikap serta perilaku komunitas atau institusi pada saat ini.
3. Memfokuskan usaha-usaha pada saat ini pada hal-hal yang diharapkan dapat membawa dampak positif yang besar dalam jangka panjang.
4. Menumbuhkan *sense of purpose* dan memimpin proses perubahan.

5. Perencanaan Pengembangan Pariwisata

Menurut Yoeti (2016:58-59) ada beberapa prinsip-prinsip dalam perencanaan pengembangan pariwisata yang hendaknya diterapkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengembangan kepariwisataan haruslah merupakan suatu kesatuan dengan pembangunan regional atau nasional dari pembangunan perekonomian suatu negara. Karena itu perencanaan pengembangan kepariwisataan hendaknya termasuk dalam kerangka kerja dari pembangunan ekonomi dan sosial-budaya yang hidup di negara tersebut.

2. Seperti halnya perencanaan sektor perekonomian lainnya, perencanaan pengembangan kepariwisataan mengehendaki pendekatan terpadu (*integrated-approach*) dengan sektor-sektor lainnya yang banyak berkaitan dengan bidang kepariwisataan.
3. Perencanaan pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah haruslah di bawah koordinasi perencanaan fisik daerah tersebut secara keseluruhan.
4. Perencanaan fisik suatu daerah untuk tujuan pariwisata harus pula berdasarkan suatu studi yang khusus dibuat untuk itu dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan, alam dan budaya di daerah sekitarnya. pula penelitian yang sesuai dengan lingkungan alam sekitar dengan memperhatikan faktor.
5. Perencanaan fisik suatu daerah untuk tujuan pariwisata harus didasarkan atas penelitian yang sesuai dengan lingkungan alam sekitar dengan memperhatikan faktor geografi yang lebih luas dan tidak meninjau dari segi administrasi saja.
6. Rencana dan penelitian yang berhubungan dengan pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah harus memperhatikan faktor ekologi daerah yang bersangkutan.
7. Perencanaan pengembangan kepariwisataan tidak hanya memperhatikan masalah dari segi ekonomi saja, tetapi tidak kalah pentingnya memperhatikan masalah sosial yang mungkin ditimbulkannya.

8. Pada masa-masa yang akan datang jam kerja para buruh dan karyawan akan semakin singkat dan waktu senggang akan semakin panjang, karena itu dalam perencanaan pariwisata, khususnya di daerah yang dekat dengan industri perlu diperhatikan pengadaan fasilitas rekreasi dan hiburan di sekitar daerah sebagai *pre-urban*.
9. Pariwisata, walau bagaimana bentuknya tujuan pengembangannya tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan orang banyak tanpa membedakan ras, agama dan bangsa karena itu pengembangan pariwisata perlu pula memperhatikan kemungkinan peningkatan kerja sama dengan bangsa-bangsa lain yang saling menguntungkan.

6. Kebijakan dan Langkah-Langkah Pengembangan Pariwisata

Menurut Muljadi (2012:72-78) dalam upaya mengembangkan pariwisata agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi melalui kebijakan dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan secara terus menerus, kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

1. Menjadikan pariwisata sebagai penghasil devisa utama Upaya memperkuat perekonomian Indonesia perlu peningkatan penerimaan devisa, dimana salah satu sektor potensialnya adalah sektor pariwisata, untuk itu kebijaksanaan yang ditempuh adalah:
 - a. Mencegah pemasaran dan promosi dengan member peranan yang lebih dominan bagi usaha pariwisata.
 - b. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi berbagai sektor terkait, baik ditingkat pusat maupun daerah dalam setiap

kegiatan pemasaran dan promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri.

- c. Menggarap lebih intensif pasar Asia Pasifik sehingga akan semakin meningkatkan pangsa pasar.
 - d. Menggarap segmen pasar yang berpotensi pembelanjaan tinggi dengan didukung peningkatan mutu pelayanan dan diversifikasi produk.
 - e. Memberikan kemudahan wisman untuk mengadakan perjalanan.
 - f. Peningkatan promosi terpadu dalam lingkup bilateral, regional, dan multilateral.
 - g. Meningkatkan citra pariwisata Indonesia melalui keikutsertaan dalam *event-event* pariwisata internasional.
 - h. Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan promosi melalui penyajian data dan informasi yang akurat.
2. Menjadikan pariwisata nusantara sebagai pendorong pembangunan
- Sebagai sektor pembangunan yang multidimensional, pengembangan pariwisata nusantara yang mempunyai potensi dampak pengganda (*multiplier effect*) yang relatif besar, sebagai pendorong pembangunan, untuk itu kebijaksanaan yang ditempuh adalah:
- a. Meningkatkan sadar wisata masyarakat melalui pemasyarakatan Sapta Pesona.

- b. Mengembangkan promosi dalam negeri untuk menjadikan nusantara sebagai daerah tujuan wisata bagi penduduk Indonesia.
 - c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kepariwisataan nasional.
 - d. Penyebarluasan informasi objek dan daya tarik wisata serta sarana pendukungnya kepada masyarakat.
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana untuk segmen pasar wisnus (wisata remaja, lansia, dan penyandang cacat).
3. Meningkatkan ketangguhan dan kepariwisataan nasional
- Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang penuh persaingan, maka produk wisata harus mampu meningkatkan ketangguhan ditengah-tengah persaingan yang cukup ketat, untuk itu kebijaksanaan yang ditempuh adalah:
- a. Menyusun perencanaan pembangunan pariwisata nasional untuk dijabarkan ketingkat daerah dengan memperhatikan pola dasar pembangunan daerah, rencana Tata Ruang Daerah dan standarisasi mutu produk.
 - b. Penyesuaian pembangunan daerah tujuan wisata dengan potensi masing-masing, serta mempertimbangkan sasaran pasar yang akan diraih dengan mempertimbangkan tahap perkembangannya.
 - c. Pengembangan produk wisata di luar Jawa dan Bali dengan pemantapan dan peningkatan Kawasan Pembangunan Ekonomi

Terpadu (KAPET), Kawasan Andalan Prioritas, dan kawasan tertentu lainnya dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan.

- d. Pengembangan dan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, budaya dan minat khusus sebagai komponen utama untuk meningkatkan produk wisata yang berkualitas.
 - e. Pembinaan dan pengembangan uaha sarana pariwisata dan pengusahaan sarana pariwisata (akomodasi, kawasan pariwisata, wisata tirta, restoran, angkutan wisata, serta sistem pendukungnya).
 - f. Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
 - g. Meningkatkan dan memperluas aksesibilitas guna mendukung pengembangan pariwisata.
 - h. Meningkatkan mutu pelayanan informasi kepariwisataan.
 - i. Pengembangan sistem informasi pariwisata melalui penyedia pusat data yang handal.
 - j. Meningkatkan kualitas produk pariwisata sebagai antisipasi terhadap meningkatnya tuntutan wisatawan.
 - k. Peningkatan penggunaan IPTEK guna mendukung optimalisasi pengembangan kepariwisataan.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kepariwisataan

Sebagai penyelenggara kegiatan kepariwisataan, peranan sumber daya manusia sangat penting, dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, maka kegiatan-kegiatan

kepariwisataan dapat menghasilkan pelayanan yang professional, untuk itu perlu ditempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut:

a. Mengembangkan lembaga pendidikan dan latihan

Guna menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan secara professional dibidang kepariwisataan, perlu dikembangkan model pendidikan dan latihan dengan memberikan fasilitas fisik dan non-fisik dan memanfaatkan IPTEK *modern*.

b. Memperbanyak jumlah pemandu wisata dan penyelia professional

Pelayanan jasa kepariwisataan juga bertumpu pada profesionalnya pemandu wisata dan penyelia. Peningkatan kemampuan professional ini mencakup penguasaan dalam memahami dan menggunakan bahasa sehingga perlu dilakukan akreditasi terhadap lembaga penyelenggara pendidikan dan latihan dibidang kepariwisataan.

c. Mengembangkan kerja sama internasional

Kerjasama dalam memberikan pendidikan dan latihan secara internasional, dapat dimulai dengan kerja sama antara negara-negara ASEAN. Hal ini dimaksudkan meningkatkan profesionalnya pemandu dan penyelia wisata, dengan cara merasakan secara langsung pemberian layanan kepariwisataan.

5. Peningkatan Kemitraan Masyarakat, Swasta, dan Media Massa

Keberhasilan Pembangunan Kepariwisata Nasional merupakan hasil kerja dan instansi pemerintah pusat dan daerah serta instansi swasta, dengan dukungan masyarakat dan media massa, oleh karena itu guna pencapaian sasaran pembangunan kepariwisataan nasional perlu ditempuh kebijaksanaan sebagai berikut:

a. Peningkatan pembinaan media massa

Upaya menyebarkan objek dan daya tarik wisata perlu terus ditingkatkan dengan mengajak serta keterlibatan media massa dalam pemberitaan secara nasional dan internasional. Oleh karena itu, penyampaian data dan informasi mengenai pembangunan kepariwisataan nasional perlu lebih ditingkatkan melalui berbagai forum dan kesempatan, dan dilakukan pembinaan terhadap wartawannya.

b. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan

Penyertaan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan dapat ditempuh melalui pembinaan organisasi-organisasi kemasyarakatan, khususnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan, seperti upacara-upacara adat setempat.

c. Peningkatan pembinaan unit ekonomi setempat

Penyertaan lembaga-lembaga ekonomi daerah, seperti Koperasi Unit Usaha Cenderamata, dan unit usaha lainnya sangat diperlukan untuk lebih memperbanyak akses ekonomi kepariwisataan. Penyertaan ini dilakukan secara bersama-sama

dengan upaya pembinaan, agar penyelenggaraan kewirausahaan ini mengikuti selera pasar bagi wisatawan mancanegara dan nusantara.

- d. Mendorong peran serta organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan pemahaman terhadap pembangunan kepariwisataan.

6. Peningkatan Kerja Sama Lintas Sosial

Pembangunan sektor pariwisata menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat, sehingga keterpaduan pembangunan pariwisata memerlukan peningkatan kerja sama lintas sektoral sehingga perlu ditempuh kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. Memantapkan pengaturan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- b. Menanamkan pengertian yang sama tentang pentingnya sektor pariwisata kepada lembaga-lembaga terkait, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- c. Meningkatkan kerjasama antarlembaga dengan memfungsikan lembaga-lembaga koordinasi yang ada.
- d. Meningkatkan keterpaduan pembinaan unit-unit usaha yang terkait dengan bidang kepariwisataan.
- e. Pemantapan keterpaduan pengembangan daerah tujuan wisata yang didukung oleh pengemban jaringan perhubungan.

- f. Penyusunan perencanaan pengembangan kepariwisataan secara menyeluruh dan terpadu serta pemantapan konsolidasi antarsektor terkait.

C. Kerangka Pikir

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dijelaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga pembangunan dibidang pariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan, bahwa pembangunan usaha kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Lampung yang dilakukan melalui perencanaan menyeluruh dan kerangka kerja sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural.

Pengembangan pariwisata sesuai dengan Pasal 5 Huruf F Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa dalam penyelenggaraannya akan menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan dan di dalam Pasal 1 Ayat 21 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa penyelenggara pariwisata

adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pariwisata baik yang berasal dari pemerintah, pengusaha, lembaga-lembaga masyarakat dan masyarakat.

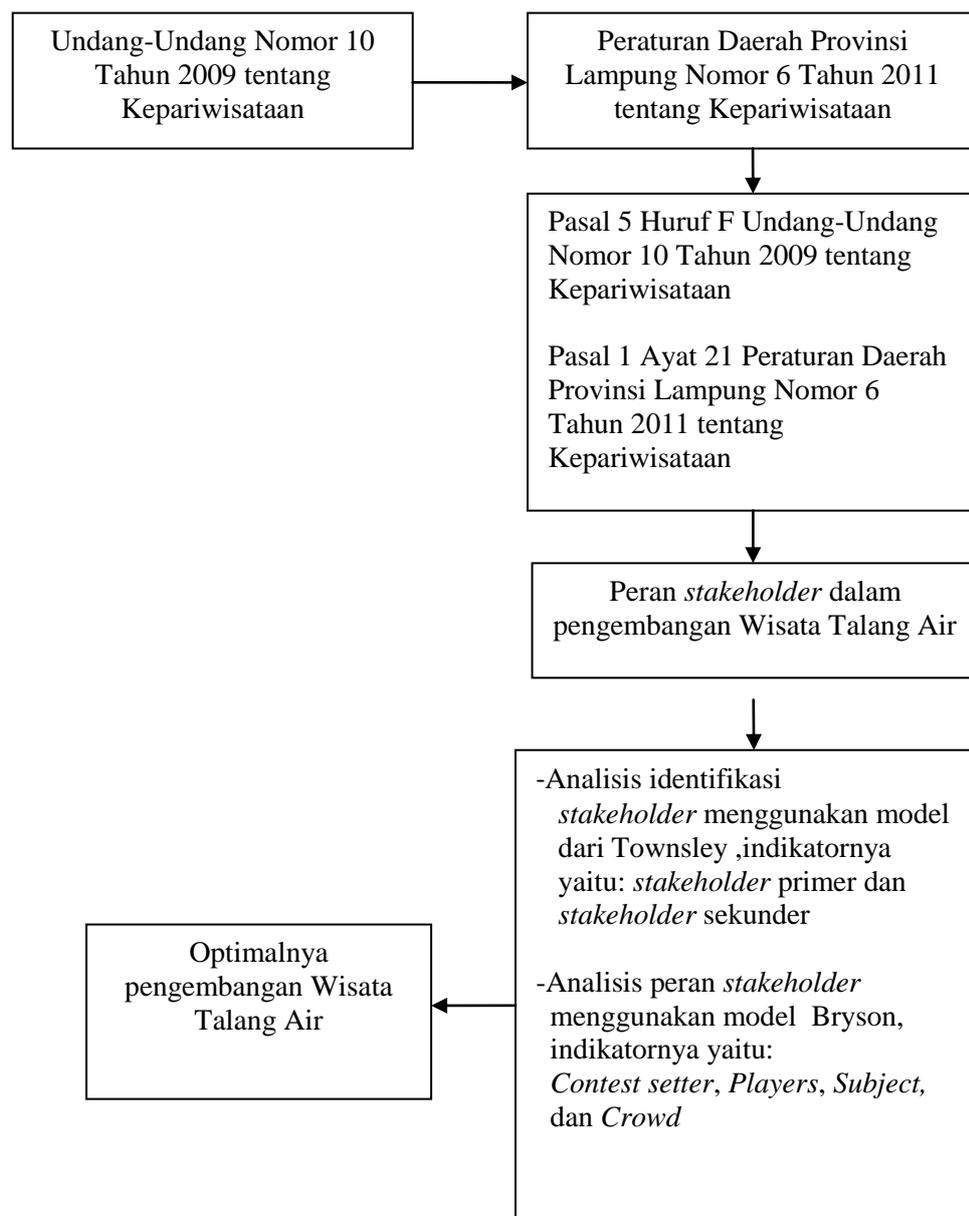
Talang air peninggalan kolonial Belanda yang saat ini masih dapat berdiri kokoh memiliki keunikan tersendiri dan menjadi daya tarik bagi pengunjung yang seringkali dibuat kagum dengan hasil teknologi buatan Belanda pada masa itu. Talang air yang menghubungkan antarbukit dengan pemandangan hamparan sawah dan sungai yang mengalir di bawahnya menampilkan keindahan pemandangan alam sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata berbasis ekowisata dengan memanfaatkan bukit-bukit yang ada di sekitar talang air menjadi taman wisata.

Pengembangan Wisata Talang Air tentunya melibatkan berbagai pihak yang disebut sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki andil dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya, untuk mengidentifikasi siapa saja *stakeholder* yang berperan dalam pengembangan Wisata Talang Air, peneliti menggunakan model analisis Townsley, adapun indikatornya yaitu: *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder, sedangkan untuk menganalisis peran *stakeholder* berkaitan dengan apa saja yang dilakukan *stakeholder*, peneliti menggunakan model analisis Bryson, adapun indikator-indikatornya yaitu: *Contest setter*, *Players*, *Subject*, dan *Crowd*.

Dari temuan dilapangan, peneliti menemukan adanya kerjasama yang baik antar*stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan Wisata Talang Air

sehingga proses pengembangan Wisata Talang Air dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan deskripsi diatas, peneliti akan menggambarkan skema kerangka konsep dalam kaitannya peran *stakeholder* dalam pengembangan Wisata Talang Air agar dapat mempermudah arah penelitian skripsi ini.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin dalam Sujarweni (2014:6) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Menurut Bogdan dan Taylor dikutip oleh Kaelan (2012:5) penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (bisa lisan untuk penelitian agama, sosial, budaya, filsafat), catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian.

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tipe penelitian deskriptif adalah tipe penelitian untuk memberikan pemaparan

yang jelas dan rinci secara deskriptif tentang suatu fenomena atau gejala sosial.

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian tersebut untuk menggambarkan bagaimana peran *stakeholder* dalam mengembangkan Wisata Talang Air peninggalan kolonial Belanda di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian digunakan sebagai faktor untuk memperdalam penelitian. Fokus penelitian perlu dilakukan karena mengingat adanya keterlibatan, baik tenaga, dana, dan waktu, serta supaya hasil penelitian lebih terfokus.

Menurut Moleong (2000:237), fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan, walaupun data itu menarik. Perumusan fokus masalah dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah masih tetap dilakukan sewaktu penelitian sudah berada di lapangan. Adapun fokus penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis siapa saja yang menjadi *stakeholder* dan bagaimana peran *stakeholder* dalam mengembangkan Wisata Talang Air peninggalan kolonial Belanda di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu, untuk mengidentifikasi dan menganalisis siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam mengembangkan Wisata Talang Air

menggunakan teori *stakeholder* yang dikembangkan oleh Townsley indikator-indikatornya yaitu:

1. *Stakeholder* primer adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap sumber daya, baik sebagai mata pencaharian ataupun terlibat langsung dalam eksploitasi.
2. *Stakeholder* sekunder adalah pihak yang memiliki minat atau kepentingan secara tidak langsung, atau pihak yang tergantung pada sebagian kekayaan atau bisnis yang dihasilkan oleh sumber daya.

Sedangkan untuk menganalisis bagaimana peran *stakeholder* berkaitan dengan apa saja yang dilakukan *stakeholder* dalam mengembangkan Wisata Talang Air dengan menggunakan teori *stakeholder* yang dikembangkan oleh Bryson indikator-indikatornya yaitu:

1. *Contest setter*, memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi risiko yang signifikan untuk harus dipantau.
2. *Players*, merupakan *stakeholder* yang aktif karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek/program.
3. *Subject*, memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Namun mereka dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi dengan *stakeholder* lainnya.
4. *Crowd*, merupakan *stakeholder* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi

pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Pengaruh dan kepentingan akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan.

C. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian, Moleong (2004:86) menyatakan cara terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu karena talang air yang dikembangkan menjadi objek wisata berada di Kelurahan Pajaresuk.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh, menurut Sujarweni (2014:73-74) sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari responden melalui kuisisioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi.

2. Data Sekunder

Data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-

buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi.

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini *sampling* dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Wisata Talang Air peninggalan kolonial Belanda baik pemerintah maupun masyarakat.

Tabel 4. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Sukarman, S.Pd	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu
2	Bambang Sutrisno	Lurah Pajaresuk
3	Suratmin	Ketua Pengelola Wisata Talang Air
4	Makful	Pengelola Wisata Talang Air Seksi Humas dan Pengembangan Sumber Daya
5	Catur Rahmadianto	Pengelola Wisata Talang Air
6	Suhardi	Masyarakat pemilik tanah
7	Ahmad Suwaji	Pekerja di Wisata Talang Air
8	Galih Sakti P	Masyarakat sebagai pekerja di Wisata Talang Air

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2017

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif, sehingga data yang diperoleh haruslah

mendalam, jelas dan spesifik, selanjutnya dijelaskan oleh Sujarweni (2014:31-34) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi dokumen, dan diskusi kelompok terarah, adapun penjelasan dari masing-masing teknik tersebut yaitu:

1. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

Adapun yang dapat dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu dan masyarakat yang menjadi pengelola Wisata talang air.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap

pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.

Teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung terkait dengan peran *stakeholder* dalam mengembangkan Wisata Talang Air peninggalan kolonial Belanda di Desa Pajaresuk Kabupaten Pringsewu.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk surat, catatan, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, *memorial*, *clipping*, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, data tersimpan di *website*, dan lain-lain. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

Peneliti mengumpulkan data tentang pariwisata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Provinsi Lampung, Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Lampung

Tahun 2015-2019, foto objek wisata talang air, *pamphlet* dan *banner* tentang Wisata Talang Air.

4. Diskusi Kelompok Terarah

Metode pengumpulan data ini lewat diskusi terpusat, yaitu usaha mengungkap makna sebuah masalah dari suatu diskusi kelompok yang terpusat, hal ini untuk menghindari pemaknaan yang salah hanya oleh seorang peneliti untuk menghindari pemaknaan yang salah maka dibuatlah kelompok diskusi, dengan beberapa orang mengkaji sebuah masalah diharapkan akan diperoleh hasil pemaknaan yang lebih objektif dibandingkan pemaknaan menurut seorang individu yang menyebabkan hasil pemaknaan tersebut subjektif.

Teknik diskusi kelompok terarah ini digunakan untuk mencapai kebenaran penelaian dengan meminta pendapat dari beberapa individu lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Basrowi dan Suwandi (2008:193) analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mengadakan sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan membuat keputusan apa yang akan diceritakan kepada orang lain .

Sugiyono (2009:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi (2008:209) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2009:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang akan direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2009:249) dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini mulai dicari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Menurut Sugiyono (2009:252) kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini karena masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan.

Selain itu dalam analisis data juga akan digunakan matriks analisis peran *stakeholder* yang dikembangkan oleh Bryson. Menurut Bryson analisis peran pemangku kepentingan (*stakeholder*) dimulai dengan menyusun *stakeholder* pada matriks dua kali dua menurut *interest* (minat) *stakeholder* terhadap suatu masalah dan *power* (kekuasaan) *stakeholder* dalam mempengaruhi masalah.

H. Teknik Keabsahan Data

Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2000:173) Terdapat empat kriteria keabsahan data dan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu:

1. *Credibility* (derajat kepercayaan)

Teknik pemeriksaan yang digunakan untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data adalah dengan memperpanjang keikutsertaan pada latar penelitian dan ketekunan pengamatan yang memungkinkan kedalaman penelitian.

2. *Transferability* (keteralihan)

Konsep ini menyatakan bahwa generalisasi suatu pertemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu.

3. *Dependability* (ketergantungan)

Untuk menentukan data peneliti menggunakan teknik audit ketergantungan dengan mengecek sejauh mana data digunakan dalam analisis.

4. *Comfirmability* (kepastian)

Untuk menentukan kepastian data maka peneliti menggunakan teknik audit kepastian dengan menelusuri kembali jejak peneliti mulai dari catatan wawancara, dokumen sampai analisis datanya

Keabsahan merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian, keabsahan dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat.

Salah satu caranya dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton dalam Saputra (2013:42) ada tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu:

1. Triangulasi data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

2. Triangulasi pengamat

Adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

3. Triangulasi metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran *stakeholder* dalam pengembangan Wisata Talang air adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder* primer

Masyarakat berperan sebagai *stakeholder* primer karena masyarakat memiliki kepentingan langsung sebagai pihak yang berperan aktif dalam pengembangan Wisata Talang Air dan keberadaan Wisata Talang Air mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat. Masyarakat tersebut ialah masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kelurahan Pajaresuk dan masyarakat yang tergabung dalam Karang Taruna Kelurahan Pajaresuk.

2. *Stakeholder* sekunder

Stakeholder sekunder dalam pengembangan Wisata Talang Air di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu adalah Pemerintah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Pemerintah Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu dan Pemerintah Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi

Lampung, karena meskipun mereka tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan Wisata Talang Air mereka memiliki kepentingan yang mengharuskan mereka untuk ikut terlibat di dalam proses pengembangannya.

3. *Stakeholder contest setter*

Masyarakat Kelurahan Pajaresuk yang memiliki tanah di sekitar talang air yang kemudian tanah miliknya dijadikan lahan untuk mengembangkan Wisata Talang Air merupakan *stakeholder contest setter* karena mereka memiliki pengaruh yang tinggi terhadap perkembangan Wisata Talang Air sebab tanah miliknya dijadikan sebagai lahan untuk mengembangkan Wisata Talang Air tetapi mereka memiliki sedikit kepentingan karena tidak terlalu ikut campur dalam proses pengelolaan dan pembangunan-pembangunan dibidang lainnya.

4. *Stakeholder players*

Stakeholder players dalam pengembangan Wisata Talang Air adalah masyarakat Kelurahan Pajaresuk yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan masyarakat yang tergabung dalam Karang Taruna karena mereka bertindak sebagai pihak yang paling dominan dalam mengembangkan Wisata Talang Air. Masyarakat memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi telah melakukan berbagai pembangunan yang mendukung pengembangan Wisata Talang Air yaitu: Pembuatan jalan dan tugu selamat datang, Pembuatan loket masuk dan loket keluar, Pembuatan jalur masuk untuk pejalan kaki, Penataan area parkir kendaraan pengunjung,

Pembuatan pagar di samping talang air, Pembangunan mushola dan toilet, Pembangunan jalan alternatif, dan Pembuatan loket kesekretariatan Wisata Talang Air.

5. *Stakeholder subject*

Stakeholder subject dalam pengembangan Wisata Talang Air adalah pemerintah, yaitu: Pemerintah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Pemerintah Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu dan Pemerintah Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung. Pembangunan yang telah dilakukan oleh *stakeholder subject* yaitu: pembangunan panggung kesenian, pembangunan kios cinderamata, pembuatan kotak sampah, dan pembangunan pagar pembatas.

6. *Stakeholder crowd*

Stakeholder crowd dalam pengembangan Wisata Talang Air adalah pihak Bank Lampung, CV. Syam, dan distro Serupadia karena mereka telah ikut terlibat dalam pengembangan Wisata Talang Air meskipun hanya memiliki sedikit kepentingan dan sedikit pengaruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan penjelasan di atas maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Masyarakat dan Pemerintah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dapat bekerjasama untuk membentuk komunitas-komunitas budaya agar dalam pengembangan Wisata Talang Air tidak hanya

mengedepankan pembangunan fisik saja tetapi juga mengembangkan wisata budaya masyarakat setempat.

2. Meskipun masyarakat sebagai pihak yang paling dominan dalam pengembangan Wisata Talang Air namun sebaiknya Pemerintah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu ikut terlibat dalam perencanaan pengembangan Wisata Talang Air kedepannya.
3. Talang Air merupakan aset sejarah milik provinsi sebaiknya Pemerintah Kabupaten Pringsewu bisa mengajak Pemerintah Provinsi Lampung yang dalam hal ini adalah pihak Museum Lampung dan Museum Ketrasmigrasian untuk berkoordinasi dalam menjaga Talang Air serta Pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi Lampung yang berwenang menangani masalah pariwisata di seluruh Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Heene, Aime, dkk. 2015. *Manajemen Staregik Keorganisasian Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif : Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Agama dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma.
- Muljadi. 2012. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Widodo, Teguh. 2015. *Pembangunan Endogen (Mengabaikan Peran Negara dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Yoeti, Oka A. 2016. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka.

Jurnal

- Amalyah, Reski; Hamid, Djamur dan Hakim, Luchman. 2016. *Peran Stakeholder pariwisata dalam Pengembangan Pulau Samalona sebagai Destinasi Wisata bahari*. Malang: Jurnal fakultas Ilmu Administrasi Bisnis. Vol. 37, No.1: 158-163.
- Iqbal, Muhammad. 2007. *Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian*. Bogor: Jurnal Litbang Pertanian. Vol. 26, No.3: 89-99.
- Hardiansyah, Gusti. 2012. *Analisis Peran Berbagai Stakeholder dalam Menyongsong Era Pembangunan KPH di Kabupaten Ketapang*. Pontianak: Jurnal Fakultas Kehutanan Untan. Vol. 8, No.3: 186-194.
- Oktavia, Siska dan Saharuddin. 2013. *Hubungan Peran Stakeholder dengan Partisipasi Masyarakat dalam Program Agropolitan Desa karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor*. Bogor: Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol. 1, No.3: 231-246.
- Santoso, Heri. 2015. *Peranan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Pariwisata di Taman Nasional Bunaken Sulawesi Utara*. Manado: Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. Vol. 12, No.3: 197-211.
- Wakka, Abd. Kadir, dkk. 2013. *Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman Nasional Bantimulung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Jurnal Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Vol. 20, No.1: 11-21.
- Wakka, Abd. Kadir. 2014. *Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Jurnal Balai Penelitian Kehutanan Makassar. Vol. 3, No.1: 47-55.

Website

<http://www.kemenpar.go.id> diakses pada tanggal 29 Agustus 2017.

<https://ojs.unud.ac.id> diakses pada tanggal 21 September 2017

<https://eprints.uny.ac.id> diakses pada tanggal 10 November 2017

<https://repository.usu.ac.id> diakses pada tanggal 10 November 2017

Skripsi

- Nizatama, Annisa Fadia. 2015. *Sinergitas Pembangunan Pariwisata (studi kasus di Teluk Kiluan Tahun 2014)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Saputra, Agus. 2013. *Penerapan Good Governance dikalangan street Level Bureucracy (studi pada KKP Pekon Sukoharjo III. Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu Tahun 2012)*. Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Lampung.

Wahyuni, Ajeng Dyah. 2017. *Implementasi Program SIM Online Pada Polresta Bandar Lampung*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Sumber lain-lain

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Induk Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataaan.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.